

**PERSEPSI SISWA TENTANG PENERAPAN PENDIDIKAN GRATIS
HUBUNGANNYA DENGAN MUTU PENDIDIKAN SISWA
SMAN 1 WOJA KABUPATEN DOMPU**

Muzakkir

Program Studi Teknologi Pendidikan FIP IKIP Mataram

E-Mail: muzakkirab08@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pendidikan gratis oleh pemerintah pusat atau yang biasa dikenal dengan wajib belajar 9 Tahun dari Sekolah Dasar Sampai Sekolah Menengah Pertama tetapi tidak sampai tingkat SMA/SMK. Pemerintah daerah kabupaten dompu menyelenggarakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK dengan anggaran daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendidikan gratis di SMA hubungan dengan mutu pendidikan. Mutu dalam hal ini yaitu hasil belajar siswa. Dari analisis perhitungan hasil belajar bahwa 80% dari 95 jumlah siswa Kelas XI yang dijadikan sampel mayoritas memenuhi standar KKM dengan rata-rata nilai 85 diatas standar KKM 75. Respon siswa yang setuju dan sangat setuju tentang penerpan pendidikan gratis berjumlah 64 siswa atau 67%. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai Fhitung > Ftabel artinya tolak Ho dan terima Ha berarti penerapan pendidikan gratis ada hubungannya dengan mutu atau hasil belajar siswa.

Kata kunci : *Pendidikan Gratis, Mutu Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu penyokong kemajuan suatu bangsa sehingga negara sangat berambisi untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan saat ini, menurut Soedijarto (2008:1) mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Bahkan ditegaskan dalam tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam undang-undang No 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan ini yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan indonesia sehingga dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan masing-masing. Bahkan pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut melakukan berbagai upaya menelurkan program peningkatan mutu pendidikan maupun pemerataan pendidikan agar dapat dinikmati oleh

semua kalangan. Salah satu program pemerintah adalah penyelenggaraan pendidikan gratis atau wajib belajar 9 tahun dengan biaya ditanggung pemerintah. sebagai konsekuensi program tersebut, pemerintah wajib menanggung segala biaya operasional di setiap penyelenggaraan pendidikan baik itu setingkat SD dan SMP.

Penyelenggaraan pendidikan gratis tidak hanya sebagai upaya pemerataan pendidikan agar bisa dinikmati oleh setiap anak bangsa saat ini, tetapi harusnya mengupayakan agar menjamin mutu pendidikan, karena mutu lebih utama dalam setiap penyelenggaraan satuan pendidikan. Menurut Soedijarto (2008: 56), bahwa rendahnya mutu atau kualitas pendidikan di samping disebabkan oleh karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem kurikulum, dan penggunaan prestasi hasil belajar secara kognitif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan, juga disebabkan karena sistem evaluasi tidak secara berencana didudukkan sebagai alat pendidikan dan bagian terpadu dari sistem

kurikulum. Maka dalam penyelenggaraan pendidikan gratis harus memenuhi segala unsur penunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar seperti kualitas guru, sarana yang mendukung, pola belajar yang kondusif, kelayakan bahan ajar, pelayanan yang lebih baik, dan kesejahteraan guru. Maka semua ini harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan gratis ketika hal ini tidak mendukung maka akan menyebabkan ketimpangan dalam proses pelaksanaannya. Menurut Mulyasa (2002: 12-13), ada beberapa penyebab mutu pendidikan menjadi rendah salah satunya adalah rendahnya kualitas guru sehingga prestasi belajar siswa rendah. Pemerintah dalam hal ini sudah menyelenggarakan pendidikan gratis dengan wajib belajar 9 Tahun pada jejang SD/SMP bahkan ini menjadi prioritas utama pemerintah pusat dengan upaya menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Demikian halnya subsidi pendidikan gratis jenjang SMA/SMK/MA yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Dompu sejak Tahun 2008 demi memenuhi

standar nasional tanpa memungut biaya kepada masyarakat itu dihitung membutuhkan dana sekitar Rp 7 M lebih atau cost rata-rata Rp. 600 ribu persiswa pertahun.

Menurut Suaidinmath (2011) Pendidikan dasar dan menengah gratis bermutu yang di canangkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten dompu seharusnya tidak lagi jadi keluhan masyarakat. Kebijakan pemerintah maupun pemerintah pusat tentang pendidikan gratis yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan (PP No.19 Tahun 2005) adalah Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, agar semua anak usia wajib belajar dapat memperoleh akses belajar. Walaupun latar belakang utama pendidikan gratis baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah agar semua anak usia wajib belajar dapat memperoleh akses belajar, dan tidak boleh memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan semua latar belakang lainnya. Semua anak usia 7 – 15 & 16-18 Tahun harus dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Lebih

lanjut Suaidinmath (2011) melontarkan pertanyaan apakah sekolah gratis dapat meningkatkan mutunya?, maka seharusnya perlu ada penelitian lebih lanjut apakah oleh para praktisi pendidikan, atau perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki otoritas untuk melakukan penelitian. Untuk itu tujuan utama dalam penelitian ini ingin mengetahui penyelenggaraan pendidikan gratis yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah kabupaten dompu, karena prinsipnya pendidikan gratis tidak hanya untuk pemerataan pendidikan namun harusnya dibarengi upaya peningkatan mutu pendidikan, mutu yang dimaksud dalam hal adalah output siswa khususnya yang mendapatkan pendidikan gratis baik itu pada tingkat SMA/SMK. Menurut Usman (2006: 410) output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. Sedangkan Sudradjad (2005: 17) menegaskan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi

kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill). Berdasarkan uraian tersebut agar tidak bias maka perlu diperjelas bahwa penelitian ini hanya fokus untuk mengetahui mutu pendidikan gratis pada komponen output siswa yaitu hasil belajar siswa yang memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sekolah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian survei dengan metode pendekatan deskripsi korelasi. Penelitian ini dirancang untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh antara dua variabel atau lebih dan seberapa besar tingkat pengaruhnya Sugiyono (2009). Sedangkan menurut Prasetyo dan Jannah (2008: 143) penelitian survei merupakan model penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang,

untuk kemudian seluruh jawaban yang peroleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Dalam konsep penelitian ini kehadiran peneliti merupakan indikator keabsahan dalam penelitian, karena peneliti dalam hal ini merupakan instrumen utama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu (1) dengan menggunakan angket (kuesioner) tertutup berupa pertanyaan terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis maupun diberikan kepada seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Woja Kabupaten Dompu yang mendapatkan layanan pendidikan gratis, kuisoner disusun dengan menggunakan skala likert, dengan kriteria dan skor 5, 4, 3, 2, 1. (2) Studi dokumentasi yaitu dengan tujuan untuk mengumpulkan data kaitan dengan hasil belajar siswa yaitu nilai ujian siswa, baik ujian sekolah, ujian tengah semester maupun ujian nasional serta absensi siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Gratis yang Bermutu

Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang memiliki andil dalam membentuk generasi yang

berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka salah tujuan pendidikan nasional mampu mengemas pendidikan yang bermutu karena mutu pendidikan merupakan hal yang penting untuk menghasilkan output yang berkualitas. Dalam hal ini mutu yang dimaksud adalah hasil yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu yang diukur dari output siswa berdasarkan standar dan ketentuan lulusan. Menurut Usman (2006: 410) output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas.

Sedangkan menurut Sudradjad (2005: 17) pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Untuk itu pendidikan gratis bermutu harusnya memenuhi unsur-unsur tersebut agar cita-cita pendidikan nasional bisa lebih baik, sehingga bangsa ini mampu bersaing dengan negara-negara maju.

Analisis Persepsi Siswa Kaitan dengan Pendidikan Gratis

Berdasarkan hasil angket (kuisisioner) menggunakan skala likert dengan kriteria Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Dari hasil perhitungan respon siswa terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis, bahwa siswa kelas XI yang berjumlah 95 maka dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Kriteria Jawaban Siswa

| Kriteria Jawaban | Skor | Nilai |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Menjawab SS | (Skor 5) | 22 |
| Menjawab S | (Skor 4) | 42 |
| Menjawab KS | (Skor 3) | 4 |
| Menjawab TS | (Skor 2) | 18 |
| Menjawab STS | (Skor 1) | 9 |

Berdasarkan data tersebut bahwa 64 siswa (42 + 22) atau 67% siswa menjawab setuju dan sangat setuju. Artinya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau mayoritas siswa SMA Kelas XI setuju dengan penyelenggaraan pendidikan gratis. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, kemudian data interval tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung jumlah skor jawaban berdasarkan skoring dari setiap jawaban siswa. Sehingga diperoleh jumlah skor ideal (Skor Tertinggi) = 5 x 95 = 475 (semua jawaban SS). Berdasarkan data tersebut bahwa tingkat respon siswa (SS) terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis = $(335:475) \times 100\% = 70.5\%$ dari sebenarnya yang diharapkan (100%)

sehingga dapat disimpulkan sebagian besar siswa berada pada kriteria setuju dan sangat setuju dengan penerapan pendidikan gratis.

Analisis Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan analisis hasil belajar siswa, dari jumlah siswa 95 rata-rata memperoleh nilai 85, sehingga dikategorikan siswa sudah memenuhi standar KKM yaitu 75. Dari 95 siswa yang tuntas secara individu yaitu 79 siswa yang tidak tuntas 16, sedangkan yang tuntas secara klasikal 83%, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan gratis berpengaruh atau ada hubungannya dengan mutu pendidikan atau dalam hal ini prestasi belajar siswa.

Hasil analisis dari nilai siswa bahwa Ftabel yaitu $df1 = 1 - 2 = 1$ dan $df2 = 95 - 2 = 93$ pada α (alpha) dengan taraf signifikan 5% sehingga diperoleh nilai Ftabel 3.94 sedangkan nilai Fhitung sebesar 4.68 artinya H_0 di tolak dan H_a diterima berarti ada hubungan penerapan pendidikan gratis dengan mutu pendidikan atau hasil belajar, maka dalam hal ini penerapan pendidikan gratis tidak berdampak pada menurunnya hasil

belajar siswa, karena mayoritas atau sebagian besar hasil belajar siswa diatas rata-rata atau memenuhi KKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, bahwa penerapan pendidikan gratis ada hubungannya dengan mutu pendidikan atau hasil belajar siswa, maksudnya dalam hal ini program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah daerah kabupaten dompu tidak berpengaruh terhadap menurunnya kualitas atau hasil belajar siswa SMA, namun sebaliknya dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang dilihat dari nilai siswa yang memenuhi KKM 80% dari jumlah siswa yang menjadi sampel penelitian yaitu 95 siswa.

Selain hasil analisis perhitungan ketuntasan hasil belajar siswa, juga respon siswa terhadap penerapan pendidikan gratis begitu antusias, Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket (kuisioiner) bahwa 64 siswa (42 + 22) atau 67% siswa menjawab setuju dan sangat setuju. Artinya sebagian besar atau mayoritas siswa SMA Kelas XI setuju dengan penyelenggaraan pendidikan gratis.

Selain itu untuk memperkuat pernyataan tersebut, kemudian data interval tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung jumlah skor jawaban berdasarkan skoring dari setiap jawaban siswa. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah skor ideal (Skor Tertinggi) = $5 \times 95 = 475$ (semua jawaban SS). Berdasarkan data tersebut maka tingkat respon siswa (SS) terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis = $(335:475) \times 100\% = 70.5\%$ dari sebenarnya yang diharapkan (100%) sehingga dapat disimpulkan sebagian besar atau mayoritas siswa setuju dan sangat setuju dengan penerapan pendidikan gratis. Didamping itu, jika dilihat dari perhitungan korelasi yang ditinjau dari nilai Ftabel dan nilai Fhitung bahwa dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya ada hubungan penerapan pendidikan gratis dengan mutu pendidikan atau hasil belajar, maka dalam hal ini penerapan pendidikan gratis tidak berdampak pada menurunnya hasil belajar siswa, karena mayoritas atau sebagian besar hasil belajar siswa diatas rata-rata atau memenuhi KKM.

Desain penelitian ini tujuannya untuk mengetahui

penerapan pendidikan gratis kaitan dengan mutu pendidikan, karena selama ini berdasarkan persepsi awal bahwa ketika pendidikan gratis diterapkan maka mutu pendidikan kurang baik atau prestasi dan hasil belajar siswa tidak optimal, namun sebaliknya penerapannya dapat menunjang peningkatan hasil belajar siswa, karena siswa tidak lagi disibukkan soal biaya dan pembayaran kebutuhan belajar, semuanya ditanggung oleh pemerintah melalui APBD sehingga siswa hanya fokus belajar dan kegiatan sekolah. Namun pada prinsipnya hasil penelitian ini bukan satu-satunya rujukan pokok atau pedoman utama untuk dijadikan standar penyelenggaraan pendidikan kedepan, tetapi ini bisa menjadi salah satu referensi ilmiah untuk mendukung program atau penelitian yang relevan dengan judul atau masalah yang mungkin mirip dengan variabel dalam penelitian ini, dan dalam penelitian ini pastinya terdapat masih banyak kekurangan sehingga perlu kiranya untuk dibenahi diperbaiki kedepannya disebabkan karena keterbatasan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyasa. 2002: *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soedijarto. 1991: *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suaidinmath (2011). Menyoal Sekolah Gratis Dikabupaten Dompur. Artikel
- Suderadjat, Hari. 2005: *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, Bandung : Cipta Lekas Garafika
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini. 2006: *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Tentang SISDIKNAS dan Penyelenggaraan Pendidikan.*